**Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh**

**Rahmito Azhari1, Wahyu Ramadhani2, Fahrul Reza3**

**Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Jln. Perumnas No. 45 Kota Langsa – Aceh**

Email : rahminto.azhari@gmail.com 1,wahyu\_ramadhani95@yahoo.com2, fahrulreza178@gmail.com3

|  |  |
| --- | --- |
| **Info Artikel**  **Riwayat:**  Diajukan : …  Ditelaah : …  Direvisi : …  Diterima : …  **Kata Kunci :**  *Traditional Institutions, Tuha Peut, Community Disputes*  **DOI:**  *10.18196/ijclc……..* | **Abstrak**  *The life of customs and customary law in Acehnese society is emphasized in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA), namely in Article 98 of the LoGA which regulates the duties, authorities, rights and obligations in carrying out the development of traditional life and customs by establishing a Aceh Qanun. Tuha Peut Gampong has not played a good role in resolving community disputes. ). The tuha peut institution consists of four elements, namely elements of ulama, adat, clever people, and community leaders. The authorities of tuha peut include appointing and dismissing geuchik, compiling reusam gampongs, supervising and resolving disputes that occur in the community. In Aceh, there are still many customary disputes that have not been resolved in the customary settlements in the gampong and many have been reported by the community to the police. This is also due to the lack of knowledge of the Tuha Peut Customary Institution in resolving disputes at the gampong level.*  *This study aims to identify the role of Tuha Peut Gampong as a gampong consultative body in the process of resolving community disputes, to find out the obstacles that cause Tuha Peut Gampong to have not played a good role in resolving disputes that occur in the community, and to find out the efforts made to strengthen the role of Tuha Peut Gampong. Gampong in the settlement of community disputes. The data in this study were obtained from literature review and field research. A literature review was conducted to obtain secondary data by studying the literature and applicable laws and regulations.* |

1. **Pendahuluan**

Dalam Pasal 98 ayat (3) Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kewenangan Umum Aceh, terdapat 13 (tiga belas) yayasan standar, salah satunya adalah Tuha Peut Gampong. Organisasi Standar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai wahana kerjasama daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Rezim/Daerah di bidang keamanan, kerukunan, kerukunan, dan permintaan masyarakat. Kerjasama ini dapat diketahui melalui tugas Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perdebatan daerah, sesuai Pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian masalah sosial secara standar diupayakan melalui organisasi standar. Dalam Pasal 115 Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Tuha Peut atau nama lain adalah Badan Permusyawaratan Gampong. Kehadiran Tuha Peut gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam kaitannya dengan administrasi publik gampong. Kemerdekaan gampong diselesaikan bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai lambang sistem pemerintahan mayoritas. Tuha Peut Gampong sebagai landasan baku dikunci di tingkat gampong dan di tingkat mukim. Hal ini harus terlihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

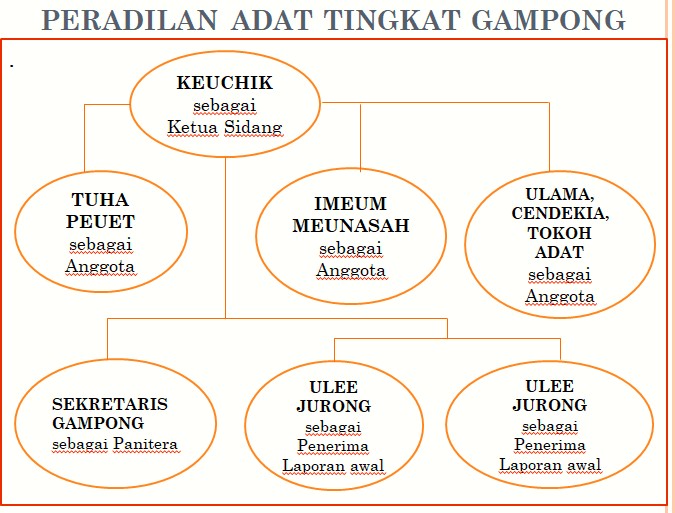
Penyelesaian persoalan-persoalan dalam peraturan baku daerah melalui musyawarah dan mufakat melalui yayasan-yayasan baku, misalnya pengadilan standar gampong sudah sering dilakukan. Hakim pengadilan standar memiliki kekuasaan dalam hal kerukunan, namun selain itu juga memiliki kedudukan untuk menyimpulkan perdebatan dalam setiap tujuan pertanyaan yang mengandung bahaya dan kewenangan Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempumyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang pimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.[[1]](#footnote-1)

Aturan persambungan ada di depan musyawarah bagi individu Aceh, mengingat telah dilakukan eksekutif hukum gampong konvensional di Aceh. Dalam setiap persoalan dalam masyarakat Aceh, penataannya selalu difokuskan melalui koneksi. Pada tingkat mendasar, perasaan kebenaran masing-masing pihak terhadap pertanyaan difokuskan pada. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan perbuatan baik dan mulia dalam kebersamaan hidup masyarakat dan hal tersebut merupakan anjuran dalam Hukum Adat.[[2]](#footnote-2)

Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau disebut juga tuha peut. Tuha Peut adalah perkumpulan para wali yang memiliki wawasan luas tentang adat dan agama. Tuha peut terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah dan kepala jurong (ujung koridor). Tuha peut mempunyai tugas melengkapi kemampuan regulasi, membicarakan atau merencanakan dan memberikan pengesahan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APB). Tuha peut berfungsi sebagai pegawas terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijak-kebijan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik).[[3]](#footnote-3)

Contoh tujuan pertanyaan pada individu asli Aceh tergantung pada kualitas Islam yang tercermin dalam cara berperilaku rutinitas rutin individu. Tahapan-tahapan tujuan yang dimaksud adalah melalui tahapan-tahapan merinci pokok perdebatan, mendapatkan laporan-laporan oleh perangkat kota, tahap pendahuluan dan terakhir tahap meneliti pilihan dan memberikan persetujuan kepada para pelaku dengan menitikberatkan pada gagasan musyawarah untuk menimbulkan perasaan, harmoni, nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat secara lahir dan bathin.[[4]](#footnote-4)

Pedoman hubungan keluarga adalah yang paling depan dalam permusyawaratan bagi individu Aceh, mengingat untuk menyelesaikan pengurusan hukum gampong adat di Aceh. Dalam setiap persoalan dalam masyarakat Aceh, penataannya selalu difokuskan melalui koneksi. Pada tingkat mendasar, perasaan kesungguhan masing-masing pihak terhadap pertanyaan difokuskan pada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan perbuatan baik dan mulia dalam kebersamaan hidup masyarakat dan hal tersebut merupakan anjuran dalam Hukum Adat.[[5]](#footnote-5)

Kehidupan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat Aceh ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu dalam Pasal 98 UUPA yang mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Kemudian diturunkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, juga Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat sebagai kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menyelenggarakan kehidupan adat.[[6]](#footnote-6) Unsur-unsur dalam Lembaga Adat Tuha Peut ini yaitu terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: tokoh ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik cendikiawan. Berikut adalah susunan peradilan adat pada tingkat desa di Aceh.

Di Aceh, masih banyak pertanyaan baku bahwa orang miskin telah menetap di permukiman adat di gampong. Demikian pula perdebatan-perdebatan yang telah dipilih di tingkat gampong yang tidak dipertimbangkan oleh majelis dalam kerangka pilihan pengadilan standar tersebut. Juga, ada debat standar yang dilaporkan langsung oleh daerah setempat kepada polisi di Kepolisian. Dengan demikan, ketika Lembaga Adat Tuha Peut tidak atau kurang pengetahuan dalam penyelesaian sengketa akan muncul permasalahan ketidakpercayaan dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat gampong.[[7]](#footnote-7)

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan eksplorasi subyektif, dengan menggunakan metodologi sosio-legitimasi yang mengharapkan bahwa landasan standar dan praktik tujuan pertanyaan melalui lembaga standar atau pengadilan saat ini dapat menjadi pemain utama dalam menaklukkan meningkatnya jumlah perdebatan di mata publik dan membuka pintu keadilan, khususnya bagi orang-orang miskin dan perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebelah mata. orang lain yang mengalami masalah dalam mencapai yayasan ekuitas standar. Selain itu, penelitian tentang regulasi standar menjadi bagian penting dalam struktur pembinaan regulasi publik, terutama jika terkait dengan bidang hukum dan kepolisian yang rapuh. Informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui eksplorasi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pemeriksaan bibliografi dilakukan dengan mengacu pada berbagai buku, artikel, catatan harian, laporan penelitian, serta peraturan dan pedoman. Sementara strategi bermacam-macam informasi diselesaikan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Partisipant Observation, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari terhadap subjek yang diteliti. Sebagai sumber penelitian, serta melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.
2. Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang mendalam tentang informan dalam penggambaran masalah yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, yaitu: Pemerintah Aceh yang terkait dengan Lembaga Adat.
3. Dokumentasi, adalah pelengkap data yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan dan gambar.

Penelitian empiris dilakukan dengan mengoordinasikan persepsi latihan penyelesaian standar dan berbicara dengan geuchik, senior kota, pertemuan tanya jawab untuk menyelidiki perspektif mereka terkait dengan model tujuan debat konvensional yang dilatih oleh daerah setempat dan pertimbangan sah yang mereka gunakan dalam memilih pertanyaan. Wawancara dengan polisi, penguji dan hakim pengadilan juga dituntun untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan mereka masing-masing tentang kebenaran pelaksanaan keadilan standar dan untuk berbicara tentang kemungkinan menyelamatkan kepolisian

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Tuha Peut Gampong**

Gampong adalah suatu kesatuan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan wilayah, adat-istiadat lingkungan setempat dan mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pemerintahan secara mandiri dalam struktur hirarki pemerintahan Aceh. Gampong memiliki individu dengan struktur pemerintahannya sendiri, memiliki banyak aturan, sumber daya, dan batas wilayah. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat-istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan “Peradilan Adat” sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.[[8]](#footnote-8)

Penyelenggaraan pemerintahan gampong merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.[[9]](#footnote-9) Penyelenggaraan pemerintahan yang seperti demikian menurut Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong.

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Tuha Peut Gampong merupakan lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong, kedudukannya yang sejajar dengan Pemerintah gampong, lembaga Tuha Peut Gampong dapat mengawal roda pemerintahan di gampong, memelihara adat dan mensejahterakan warga gampong.[[10]](#footnote-10)

Tuha Peut Gampong atau lembaga empat merupakan sebuah lembaga yang di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi *Uleebalang* (Keuchik) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka lembaga Tuha Peut ini mempunyai saham yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.[[11]](#footnote-11)

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 (Pasal 12 ayat 2) yang isinya sebagai berikut, “Keuchik sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah Dan Tuha Peut gampong”, setiap keputusan dari penyelesaian sengketa tersebut merupakan keputusan gampong.[[12]](#footnote-12)

Peradilan semacam ini sesuai dengan kualitas masyarakat Aceh, khususnya standar hubungan keluarga yang merupakan aturan mendasar pada individu asli Aceh. Ketika masalah dan peristiwa hukum terjadi di mata publik, mereka selalu berusaha diselesaikan melalui koneksi atau kebiasaan dan berfokus pada aturan keaslian di antara mereka.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa hukum semacam ini merupakan perbuatan yang baik dan sangat mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah SWT, karena hukum siklus hukum semacam ini sangat tidak dapat dibedakan dengan peraturan baku. Sementara aturan baku di Aceh dan aturan Islam terkait erat, standar yang terkandung dalam aturan baku Aceh adalah ajaran Islam yang ketat, dengan cara ini jelas bagi individu Aceh, pemukiman adat tidak berjuang dengan agama Islam yang mereka anut yang menganjurkan kerukunan. Sementara itu, untuk mengetahui syariat Islam, mungkin bisa ditanyakan kepada peneliti utama, sehingga dalam setiap gerakan baku tidak bisa dilewati bertentangan dengan agama islam.[[13]](#footnote-13)

Kalau ditelaah lebih jauh hal demikian di atas sangat sesuai dengan pandangan penganut aliran *sociological jurisprudence*, yaitu Bagi penganut aliran *sociological jurisprudence,* keberadaan hukum yang penting bukanlah sebagaimana ia tertara dalam buku prundang-udangan (*law in book)*, melainkan adalah bagaimana senyatanya perilaku masyarakat sehubungan dengan keberadaan suatu hukum *(law in action*). Inti pemikiran teori ini adalah, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.[[14]](#footnote-14)

Sebagai Tuha Peut Gampong, dalam menjalankan kewajiban dan kemampuannya harus berjalan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa sebenarnya istilah pekerjaan sudah sewajarnya diterapkan dalam konteks (sebagai tolak ukur), yang mengandung pengertian bahwa hal itu berkaitan dengan perbuatan yang mengandung kewajaran. Pedoman yang diambil secara tidak kasat mata (mengubah) disinggung sebagai standar, sedang yang di anut secara kasat mata adalah tuntutan (*demand).[[15]](#footnote-15)*

1. **Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Tingkat Gampong**

Pada saat terjadi perdebatan, Tuha Peut Gampong bersama dengan pemegang standar. Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya. Komitmen Tuha Peut Gampong merupakan kekuatan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengarahkan pemerataan untuk mengakomodir daerah setempat.Tuha Peut Gampong kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme adat.[[16]](#footnote-16)

Mekanisme penyelesaian perselisihan (peukara) serta pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Aceh umumnya meliputi:[[17]](#footnote-17)

1. Pengaduan/pelaporan,
2. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian),
3. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi, dan alat bukti),
4. Sidang persiapan putusan,
5. Penawaran Alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
6. Rapat Pengambilan keputusan (sidang pengumuman keputusan)
7. Pelaksanaan Putusan.
8. **Peran Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat**

Dalam kasus-kasus tertentu Tuha Peut Gampong juga ikut serta dan meneliti pertanyaan-pertanyaan yang ada secara lokal dan dengan asumsi bahwa ada perdebatan yang terjadi Tuha Peut Gampong melihat atau mengetahuinya sebelum dipertanggungjawabkan kepada keuchik atau penguasa gampong lainnya, Tuha Peut Gampong dapat melangkah ke piring dan menyelesaikan pertanyaan. untuk mengakomodasi sisi yang berbeda. Meski demikian, hal ini jarang dilakukan oleh Tuha Peut Gampong sendiri. Misalnya, pertempuran garis darat di Kota Teungoh. Baik Zairin dan Minin Jafar bertempur di kamar anak-anak Zairin, Tuha Peut Gampong mengetahui perdebatan dari penghuninya, alat kota hampir tidak mengenalnya, Tuha Peut Gampong dengan cepat melangkah ke piring dan mengakomodasi pertanyaan itu namun Tuha Peut Gampong kemudian mengungkapkannya kepada Keuchik, tidak langsung menanyakan kepada kedua belah pihak letak perselisihannya.[[18]](#footnote-18) Dengan sudah adanya inisiatif sebaiknya Tuha Peut Gampong bisa mendamaikan secara kekeluargaan dan menyelidiki perselisihan yang terjadi tersebut.

Di Gampong, tujuan pertanyaan biasanya diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala vila di tingkat desa. kedua pemain berkumpul dan harmoninya bersahabat. Jika tidak diselesaikan di tingkat desa, Kepala Dusun melapor kepada Keuchik untuk menindaklanjuti perdebatan tersebut. Kemudian, pada saat itu, Keuchik menyerahkannya kepada Tuha Peut Gampong dan orang-orang yang berbeda dari fungsionaris ekuitas standar. Meski demikian, menurut Salahuddin, akhir-akhir ini Tuha Peut Gampong jarang disertakan, hal ini karena Tuha Peut Gampong meminta pungutan pendahuluan, khususnya biaya pertimbangan antara individu-individu dari Tuha Peut Gampong sebelum persidangan dengan pejabat yang berbeda. , pengertian Tuha Peut Gampong disini, Tuha Peut Gampong yang berperan penuh dalam pengambilan keputusan untuk tujuan debat tanpa adanya fungsionaris yang berbeda, hal ini masih didengungkan oleh oknum-oknum dari Tuha Peut Gampong yang melampaui batas terlepas dari tidak adanya hal tersebut. muatan, perbedaan pemahaman antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong, jadinya Tuha Peut Gampong tidak diikutsertakan lagi atas dasar kebijakan Keuchik.[[19]](#footnote-19)

Di Gampong penyelesaian perdebatan oleh perangkat kota tergantung pada laporan dari daerah setempat, baik dari keluarga korban atau jaringan yang berbeda. Laporkan langsung ke Keuchik atau ke penguasa gampong lainnya. Untuk menyelesaikannya, Keuchik memanggil seorang pejabat, salah satunya adalah Tuha Peut Gampong. Hampir semua individu dari Tuha Peut Gampong hadir, namun hanya untuk mendengar data dari kedua pemain dan data dari pionir lokal yang melihat perdebatan tersebut. Syarifuddin Keuchik Kota Teungoh mengatakan keuchik adalah pejabat yang ditunjuk dan ketua pendahuluan dalam penyelesaian perdebatan daerah, penegasan ini juga disampaikan oleh Keuchik setiap gampong.[[20]](#footnote-20)

Informasi yang tergambar di atas menunjukkan bahwa tugas Tuha Peut Gampong belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti tidak adanya kontribusi Tuha Peut Gampong dalam pendahuluan tujuan debat, dikenang untuk pendahuluan namun tidak dianggap sebagai bagian yang berfungsi. masih laten, Tuha Peut Gampong kurang berperan dalam memberikan kesimpulan dan perenungan terhadap tujuan pertanyaan dengan mitra standar lainnya, dan Tuha Peut Gampong belum melangkah dan mencari tahu pertanyaan dan mengakomodasinya. Hambatan Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Perdebatan Daerah, antara lain:

1. Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan adat lainnya belum berperan sepenuhnya adalah kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi tuha peut dari pihak pemerintah setempat.
2. Tidak sama pemahaman antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dalam penyelesaian perselisihan.
3. Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik sesama anggota Tuha Peut Gampong.
4. Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah faktor kemampuan perangkat Tuha Peut Gampong dalam melakukan penyidikan atau pendekatan kepada kedua belah pihak terhadap perselisihan maupun kemampuan dalam memberi pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan.
5. **Upaya Memperkuat Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat**

Pemerintah Aceh telah menjalin kerjasama dengan Majelis Adat Aceh, dalam hal penguatan dan pembinaan kerja Tuha Peut Gampong. Latihan instruksional ini dapat digambarkan sebagai berikut:.

1. Memberikan pembinaan kepada perangkat gampong terutama untuk pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut Gampong. Darmansyah menggatakan bahwa dalam program Majelis Adat Aceh pernah memberikan pembinaan kepada perangkat gampong.[[21]](#footnote-21)
2. Sosialisasi, tentang pentingnya penyelesaian perselisihan di tingkat gampong. Dalam sosialisasi ini dijelaskan tentang peran dan tata cara penyelesaian perselisihan oleh perangkat gampong. Bentuk sosialisasi ini berupa penyerahan brosur kepada Tuha Peut Gampong dan anggota fungsionaris adat lainnya serta diberikan peraturan dan panduan secara umum kepada perangkat gampong peraturan yang terkait dengan peran dan tata cara penyelesaian perselisihan oleh perangkat gampong, tanpa menjelaskan langsung kepada perangkat gampong.

Ditingkat Kabupaten/Kota yaitu walikota/bupati juga mempunyai peran melakukan pembinaan tentang tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong melalui camat. Kecamatan sudah pernah memberikan pembinaan kepada Tuha Peut Gampong, terutama tentang proses penyelesaian perselisihan warga gampong. Sehingga Tuha Peut Gampong ikut berperan dan mampu memberikan pertimbangan serta yang memutukan perselisihan dengan tokoh adat lainnya.[[22]](#footnote-22)

Dalam penggambaran di atas, cenderung terlihat bahwa otoritas publik tidak serius dalam mengarahkan dan sosialisasi dan sangat terbatas dan, anehnya, kurang, menyebabkan perangkat gampong, khususnya Tuha Peut Gampong, tidak sepenuhnya mengetahui tugasnya, khususnya dalam menyelesaikan perdebatan daerah. Seperti yang diungkapkan Suryadi, salah satu Tuha Peut Gampong mengatakan bahwa pengarahan dan pertemuan yang dikoordinir oleh Camat untuk memberikan sosialisasi kepada otoritas gampong hilang dan, yang mengejutkan, tidak jauh menjangkau perangkat gampong masing-masing.[[23]](#footnote-23)

1. **Simpulan**

Selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pertanyaan, kelompok masyarakat Tuha Peut Gampong belum mengambil bagian yang layak, ada yang tidak terlibat, ada yang terlibat namun tidak menganggap bagian yang berfungsi, dan ada yang dinamis namun tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, khususnya dalam memberikan perenungan dan kesimpulan secara terarah.

Kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum mengambil bagian yang layak dalam menyelesaikan persoalan daerah adalah tidak adanya sosialisasi tentang kewajiban dan unsur-unsur Tuha Peut Gampong dalam menyelesaikan perdebatan dari pemerintah lingkungan, Tuha Peut Gampong dan Keuchik tidak memiliki kesamaan. Pemahaman dalam tujuan debat, individu Tuha Peut Gampong tidak adanya korespondensi dan koordinasi yang baik serta tidak adanya kemampuan yang digerakkan oleh individu dari Tuha Peut Gampong dalam bergerak menuju pertemuan tanya jawab dan kurang siap untuk memberikan renungan atau sentimen.

Upaya yang dilakukan oleh otoritas publik untuk memperkuat tugas Tuha Peut Gampong dalam menyelesaikan masalah daerah didorong dan diasosiasikan oleh Kamar Standar Aceh, dan otoritas publik melalui perangkat pemerintah daerah. Upaya ini masih sangat terbatas dan tidak memadai.

**Daftar Pustaka.**

Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh , Banda Aceh, 2009

Asnawi Zainun, 2018. *Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga* Adat, Buletin Balee Mukim.

Apri Rotin Djusfi, 2018*. Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian perselisihan Hukum Adat Aceh*, Jurnal Public Policy, Vol 2, No 1

Badruzzaman Ismail, dkk,*Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beeserta Qanun-Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007

Denys Lombard, *Kerajaan Aceh*, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Delfi Suganda, 2018. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Al-Idarah*: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 1.

Juniarti, 2012. *Peran Strategis Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal, Prosising Konferensi AICIS XI*I, UIN Arraniry, Banda Aceh.

HAW. Widjaja*. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

H.Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dsan Gampong di Aceh*.Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Muhammad Iqbal, et al. 2020. *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh* Vol. 03, No. 01.

M.Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami,* Bogor, 2005

Taqwaddin Husin, 2015. *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII.

Teuku Saiful, 2020. *Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh*, Jurnal Hukum Doktrinal, vol 2 No 2.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasiona*l , Prenada Media Group, Jakarta, 2009

**Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

1. Asnawi Zainun, 2018. Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, *Buletin Balee Mukim.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. Taqwaddin Husin, 2015. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII, 511-532. [↑](#footnote-ref-2)
3. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Iqbal, et al. 2020. *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh* Vol. 03, No. 01, hal 383-392. [↑](#footnote-ref-4)
5. Taqwaddin Husin, 2015. *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII, hal 511-532. [↑](#footnote-ref-5)
6. Apri Rotin Djusfi, 2018. *Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian perselisihan Hukum Adat Aceh*, Jurnal Public Policy, Vol 2, No 1, hal 51-58 [↑](#footnote-ref-6)
7. Delfi Suganda, 2018. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Al-Idara*h: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 1, hal 61-74. [↑](#footnote-ref-7)
8. Badruzzaman Ismail, dkk,*Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beeserta Qanun-Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007, hal. 44 [↑](#footnote-ref-8)
9. HAW. Widjaja*. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.17 [↑](#footnote-ref-9)
10. M.Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami,* Bogor, 2005, hal. 146-147. [↑](#footnote-ref-10)
11. H.Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dsan Gampong di Aceh*.Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh. hal 61. [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Sanusi Syarif, *Op. Cit.,* hal.147. [↑](#footnote-ref-12)
13. Denys Lombard, *Kerajaan Aceh*, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. hal. 45. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.66. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 hal.269. [↑](#footnote-ref-15)
16. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasiona*l , Prenada Media Group, Jakarta, 2009 . hal 241 [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh , Banda Aceh, 2009. hal 43-60. [↑](#footnote-ref-17)
18. Surayadi, Tuha Peut Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Wawancara, tanggal 18 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-18)
19. Salahuddin, Keuchik Gampong Sedorjo Kecamatan Langsa Lama, Wawancara, tanggal 7 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-19)
20. Syarifuddin, Keuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Wawancara, tanggal 8 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-20)
21. Darmansyah, Sekretaris Mejelis Adat Aceh, Wawancara, tanggal 8 April 2022 [↑](#footnote-ref-21)
22. *ibid* [↑](#footnote-ref-22)
23. Suryadi, Tuha Peut Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Wawancara, Tanggal 8 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-23)